

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Selama dua dekade terakhir, Tiongkok mengalami kemajuan sangat pesat yang membuat dunia internasional harus memberi perhatian lebih. Fenomena ini dianggap oleh Amerika Serikat (AS) sebagai sebuah ancaman dengan istilah “*China’s threat*”. Istilah “*China’s threat*” menggambarkan bahwa Tiongkok menyerupai sosok Jerman yang agresif di abad ke – 20. Zheng Bijian (2005) membuat tulisan sebagai respon istilah tersebut dengan judul “*China’s Peaceful Rise to Great – Power Status*”, tulisan tersebut yang akhirnya menjadi rujukan dari kebijakan politik luar negeri Tiongkok di era Hu Jintao. Sujian Guo (2006) dalam tulisannya “*China’s “Peaceful rise” in the 21st Century*” menjelaskan bahwa Tiongkok sudah mulai paham bagaimana pandangan dunia terhadap kebangkitannya yang dianggap ancaman, oleh karena itu hal ini, *peaceful rise*, merupakan niat dan intensi kebangkitan Tiongkok dengan cara damai dan tidak mengancam elemen apapun dalam level internasional. Fenomena ini diikuti dengan langkah – langkah Tiongkok dalam mengedepankan kerjasama dan diplomasi di level internasional, salah satu topik pembahasan mengenai *peaceful rise* ini dikaitkan dengan penyelenggaraan Beijing Olympic pada tahun 2008 sebagai bentuk *nation image branding* Tiongkok.

Namun pada tahun 2013, Xi Jin-ping mendeklarasikan rancangan “*Silk Road Economic Belt*” di Kazakhstan dan “*21st Maritime Silk Road*” di Indonesia, keduanya yang akhirnya menjadi formulasi dari One Belt One Road (OBOR) atau Belt and Road Initiative (BRI) yang berhasil menjadi wajah baru bagi politik luar negeri Tiongkok selama lima tahun terakhir (Gov.cn, 2015). Langkah ini seakan merupakan jawaban atas peran Tiongkok di kawasan yang dipertanyakan, namun alih-alih untuk fokus membangun kawasan Asia Timur – bersama Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara – Beijing lebih memilih untuk menghubungkan Tiongkok secara lebih luas yaitu dengan keseluruhan dunia. “*Silk Road Economic Belt*” adalah rencana pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Tiongkok

ke Eropa melalui Asia Tengah melalui jalur darat, sedangkan “21st Maritime Silk Road” adalah rencana pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Tiongkok ke Eropa melalui pemberhentian di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika seperti yang tergambar pada gambar 1.0.

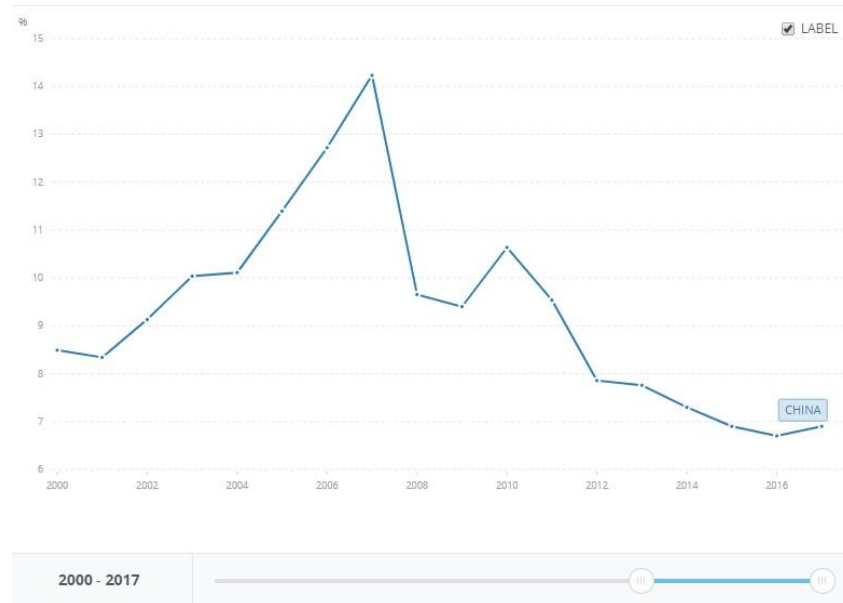
Dengan melibatkan lebih dari 65 negara dari Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat, Afrika Barat, Afrika Timur dan negara-negara Eropa, Xi Jinping menyebut BRI sebagai “Chorus” atau paduan suara dan bukan penyanyi solo yang mana menekankan bagaimana Tiongkok ingin memunculkan adanya integrasi antar negara yang terlibat (Yafei, 2015). Sedangkan mengutip dari perkataan Xi Jinping dalam upacara pembukaan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)¹ pada 16 Januari 2016 di Beijing, bahwa “The AIIB shall remain committed to open regionalism. ... With its inherent advantages and unique features, the AIIB could make the current multilateral system more dynamic to facilitate common development of multilateral institutions.” Kutipan pidato Xi Jin Ping ini bisa dinilai sebagai sebuah ajakan dalam pembentukan sistem regionalisme yang memiliki perkembangan institusi multilateral yang berkelanjutan (Xinhuanet, 2016).



Gambar 1.0 Rute Belt Road Initiatives (sumber: World Bank, 2018)

¹ AIIB adalah *multilateral development bank* (MDB) atau bank yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan mendukung proyek BRI. Secara sederhananya 65 negara mengumpulkan modal kapital dalam bank ini yang didalamnya diharapkan terjadi komunikasi kebijakan, peyatuan fasilitas, pengetatan alur perdagangan.

Di sisi lain data dari World Bank (2018) menyatakan bahwa Tiongkok bersama dengan 65 negara lain yang tergabung dalam proyek tersebut secara kolektif memegang lebih dari 30% GDP di dunia, 62% populasi, dan 75% dari jumlah cadangan energi yang diketahui. Selama 10 tahun terakhir, Tiongkok telah mengalami kemajuan yang pesat dalam hal *economic development*. Hal ini ditunjukkan dengan melihat grafik 1.1 yang mana terjadi tren naiknya GDP Tiongkok pada rentang waktu tahun 2000 sampai tahun 2010. Namun setelah tahun 2010 Tiongkok menemukan penurunan dan stagnansi dalam hal perkembangan GDP. Walaupun begitu, Tiongkok menempati peringkat kedua dalam hal *economic power* dengan jumlah GDP sebesar 12 triliun US\$ berdasarkan data dari World Bank (2019).



Gambar 1.1 Grafik tren GDP Tiongkok

(sumber: World Bank, 2019)

Dengan jumlah investasi dan kebijakan yang sangat masif, proyek ini seringkali dinamai sebagai mega-proyek dan ambisi terbesar dari Tiongkok. Dengan besarnya modal kapital yang dimiliki oleh Tiongkok dan juga diplomasi yang diterapkan oleh Tiongkok kepada beberapa negara, studi mengenai BRI telah secara luas diteliti sebagai sebuah kebijakan ekonomi, keamanan, dan politik untuk menjelaskan bagaimana BRI akan bermanfaat bagi negara tertentu atau

kawasan tertentu. Peter Cai (2017) dalam tulisannya yang diterbitkan Lowy Institute menganalisis apakah BRI merupakan kebijakan geo-strategi atau geo-ekonomi. Cai menyebutkan bahwa analisis mengenai proyek BRI melalui kacamata geo-strategi merupakan pendekatan yang kurang lengkap, hal ini karena Tiongkok menggunakan BRI untuk memunculkan kepemimpinan di regional menggunakan program integrasi ekonomi yang beragam. Cai (2019) menyiratkan bahwa pendekatan geo-ekonomi mampu menjelaskan lebih tujuan Tiongkok, terlebih dengan tiga kunci penting dalam memahami BRI yaitu: 1. Mendorong adanya perkembangan regional di Tiongkok melalui integrasi yang lebih baik dengan perekonomian negara tetangga; 2. Meningkatkan industri Tiongkok sementara mengeksport barang-barang standar Tiongkok; 3. Mencari solusi dari masalah kelebihan kapasitas produksi dan pasar. Kajian lain yang serupa membahas mengenai geo-ekonomi dan geo-strategi bisa dilihat dalam hasil forum yang diterbitkan oleh Asia Competitiveness Institute (ACI) yang berargumen bahwa terdapat tiga poin penting dalam hadirnya BRI yaitu: 1. Ekonomi; 2. Keamanan; dan 3. Dampak Geopolitik (Asia Economic Forum Seminar, 2017).

Sedangkan dalam beberapa kajian, BRI dipandang memiliki andil besar dalam perkembangan regionalisme di kawasan Asia Timur. Setidaknya Stephane Callens (2017), Tu Xinquan (2018), dan Andreas Grimmel (2018) membahas bagaimana regionalisme di kawasan Asia Timur sedikit banyak terdampak dari BRI. Dalam tulisan Callens (2017) BRI dianggap sebagai “New Regionalism” yang melahirkan beberapa peraturan-peraturan baru diantara negara yang terlibat yang diakibatkan dari gagalnya “Doha Round” dan setara bahkan melebihi TPP yang dibuat oleh Amerika Serikat (AS). Callens Sedangkan Grimmel (2018) melihat BRI sebagai model gabungan dalam regionalisme atau “A Hybrid Model of Regionalism”, argumen Grimmel adalah bahwa elemen-elemen dalam pendekatan regionalisme baru dan lama mampu ditemukan dalam proyek BRI ini dengan sentuhan tambahan dari integrasi EU. Xinquan (2018) lebih melihat bahwa terdapat intensi yang lebih dari Tiongkok untuk membuka diri sekaligus mempertahankan globalisasi. Hal ini merupakan pendekatan Tiongkok dalam mensiasati negosiasi kesepakatan yang mengikat antar pemerintah tidak dapat

bekerja lagi demi perdagangan dan liberalisasi investasi kedepannya, terutama setelah stagnansi di WTO tepatnya “*Doha Round*”.

Pada saat yang bersamaan analisis mengenai BRI sebagai manifestasi *soft power* Tiongkok dalam level global mulai menjadi topik yang diperbincangkan. Berawal dari sebuah kutipan Napoleon Bonaparte tentang Tiongkok “China is a sleeping giant. Let her lie and sleep, for when she awakens she will astonish the world”. Kutipan tersebut juga pernah digunakan oleh Xi Jinping dalam pidatonya pada Maret tahun 2014 di Paris yang menyebut Tiongkok sebagai “Singa yang telah bangun namun merupakan singa yang damai, baik, dan *civilized*” (Foreignpolicy.com, 2016). Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Tiongkok mengembangkan “*China’s Image*” dalam agenda politik mereka, seperti yang telah dituliskan oleh Wang (2003) yang menganalisis bagaimana Tiongkok dalam masa kepemimpinan Mao (1949-1976) telah menyiratkan sebagai “*peace-loving country*”, “*developing country*”, ataupun “*socialist country*”. Dalam hal ini terdapat argumen bahwa citra dari sebuah negara mampu berganti dalam lewatnya beberapa dekade atau generasi. Namun penulis setuju dengan argumen Anholt (2008) bahwa citra dari sebuah negara bisa stabil dalam waktu tertentu dan citra tersebut merupakan aset yang tetap.

Pada akhirnya pertanyaan yang masih muncul dalam kasus BRI adalah apakah sebenarnya alasan Tiongkok mengeluarkan kebijakan yang masif? Berdasarkan temuan penulis Tiongkok memiliki motif ekonomi dan politik yang kuat dalam kasus BRI, tapi berdasarkan sejarah *soft power* yang dimiliki Tiongkok penulis melihat bahwa tidak kecil kemungkinannya bahwa budaya dan identitas nasional merupakan faktor yang mendorong formulasi kebijakan BRI tersebut. Berdasarkan dokumen “*Cultural Development Plan of Action BRI*” dari Kementerian Budaya dan Pariwisata Tiongkok (2017) terdapat agenda-agenda promosi terhadap bahasa, budaya, dan sektor pariwisata “*New Silk Road Cultural Tour*” yang merupakan ambisi untuk membangun jaringan budaya yang lebih maju sejalan dengan BRI. Walaupun terdapat beberapa kegiatan mengenai budaya luar negeri dan pameran budaya di Tiongkok, namun dapat dilihat bahwa fokus dari dokumen tersebut adalah penyebaran budaya Tiongkok. Sehingga penelitian

ini akan menjelaskan mengenai celah penelitian-penelitian sebelumnya yang belum terlalu menjangkau aspek budaya dan identitas nasional Tiongkok sebagai alasan pengambilan kebijakan BRI.

1.2 Rumusan Masalah

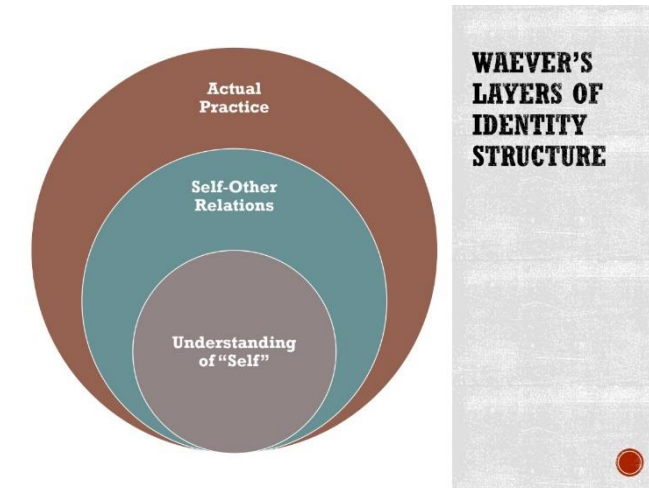
Bagaimana BRI dipandang sebagai identitas baru Tiongkok dan seberapa efektif BRI memperbaiki *national image* Tiongkok?

1.3 Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan latar belakang formulasi kebijakan BRI oleh Tiongkok dalam kacamata identitas dan budaya, penulis menggunakan setidaknya tiga kerangka pemikiran. Kerangka pertama membahas mengenai analisis kebijakan luar negeri level identitas nasional terutama melalui tulisan Ole Weaver. Kerangka kedua akan menjelaskan mengenai teori mengukur *country image* dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan BRI Tiongkok. Kerangka terakhir menjelaskan mengenai konsep dan teori *soft power* dalam perumusan kebijakan luar negeri.

1.3.1 Teori Analisis Kebijakan Luar Negeri Level Identitas Nasional

Level identitas nasional menurut Ole Weaver (2002) bukanlah alat yang mencari motif dibalik suatu pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara, melainkan lebih mengarah kepada faktor-faktor kecil lain selain level-level analisis lain yang lebih tersembunyi dan mungkin mempengaruhi kebijakan tersebut. Weaver membuat tiga tingkatan dalam struktur identitas sendiri, hal ini diperlukan karena struktur membatasi aksi sedangkan aksi yang membentuk struktur seperti bagan dalam gambar 1.2. *First layer* adalah memahami konsep “*self*” atau diri sendiri, Weaver menyebutkan bahwa dalam lapisan pertama ini sangat berkaitan dengan konstruksi identitas yang melekat secara emosional di akar budaya yang ada. Sedangkan *second layer* adalah hubungan dengan negara lain atau dibidang “*self-other relations*” yang bisa dilihat dari bagaimana satu negara mempersepsikan negara lain, dan hubungannya secara spesifik. Sedangkan *third layer* adalah kebijakan sebenarnya yang menyisakan untuk dianalisis sebagai hasil pengerucutan kedua lapisan sebelumnya.



Gambar 1.2

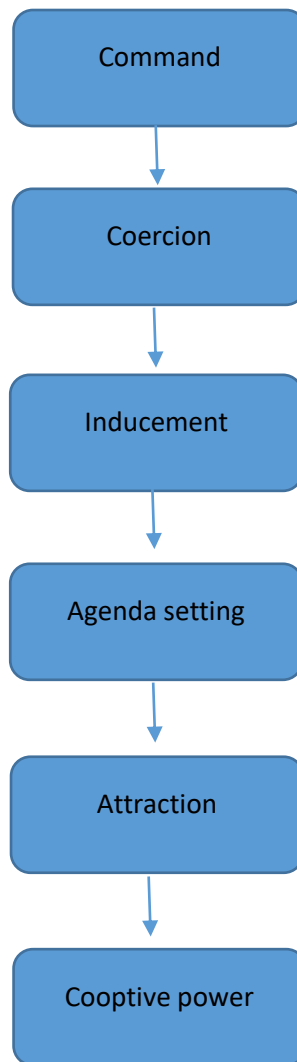
Sedangkan Valerie Hudson (1999) berargumen bahwa budaya suatu negara mencakup banyak hal, dan di antara hal-hal itu adalah harapan umum tentang bagaimana sebuah bangsa melalui para pemimpinnya akan bereaksi dalam situasi kebijakan luar negeri tertentu. Harapan ini adalah apa yang disebut pola tindakan yang terstruktur. Pola tersebut merupakan hasil dari sejarah dan pengalaman bangsa itu sendiri, dan juga merupakan produk dari interaksi satu bangsa dengan bangsa atau entitas lain dari waktu ke waktu. Penyelarasan terjadi antara budaya nasional dan budaya internasional, di mana budaya internasional mewakili peran dan harapan yang dianggap berasal dari suatu bangsa oleh negara lain dalam sistem internasional. Harapan yang berasal dari dalam negara beresonansi dengan harapan aktor lain dalam sistem. Ketika resonansi ini kuat, pola tindakan akan jelas untuk semua baik di dalam maupun di luar. Hudson (2007) juga memiliki pandangan yang sama dengan Weaver (2002) yaitu mengenai konsep untuk mendefinisikan konsep “us” dan “them”, tapi Hudson (2007) memecah identifikasi konsep identitas nasional itu dengan tiga pertanyaan yaitu “*who are we?*”; “*what we do?*”; dan “*who are they?*”.

1.3.2 Soft Power

Konsep mengenai *soft power* pertama kali tercetus melalui Joseph Nye (2004) yang mendefinisikannya sebagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui sebuah cara yang relatif halus seperti bujukan atau *attraction*

daripada cara yang koersif. Nye menyatakan bahwa daripada menggunakan ancaman secara militer atau sanksi ekonomi yang mana merupakan *hard power*, seni dari *soft power* adalah dalam penggunaan strategi yang komunikatif dimana diplomasi merupakan hal yang signifikan bagi negara untuk menyebarkan nilai dan tujuan yang serupa terhadap negara lain. Konsep *soft power* yang diusung oleh Nye menyediakan dasar teoritis dan intelektual yang mampu digunakan sebuah negara untuk merumuskan *soft power* mereka sendiri dengan membangun bahasa dan nilai yang tepat untuk mempengaruhi lawan yang ada. Hal ini dicontohkan dengan bagaimana Amerika Serikat memenangkan Perang Dingin melawan Uni Soviet melalui perang ideologi dengan asumsi bahwa “*the power of ideas finally triumphs over the power of tanks*” yang membuat pernyataan bahwa *hard power* tidak efektif melawan *soft power*.

Fragmentasi dari politik dunia kedalam lingkaran-lingkaran yang berbeda membuat *power* semakin kurang sepadan dan tidak bisa ditransfer dari satu lingkaran ke lingkaran lain. Apabila diurutkan dalam level *power* Nye (1990) membuat bagan sebagai berikut yang mana rantai kebijakan yang menunjukkan *power* dimulai dengan *command* yang merupakan kemampuan untuk memerintah pihak lain melalui sebuah paksaan. Semakin kebawah level *power* dalam arti *hard* atau *raw power* semakin kecil yang digunakan oleh pengambil keputusan tersebut. Hal ini berarti *cooptive power* memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan negara tanpa kekerasan melainkan daya tarik ideologi, budaya, dan agenda politik. Terdapat faktor penting lain yang membatasi kemampuan Tiongkok untuk berhasil mengejar *soft power*, yaitu adalah "nasionalisme baru" Tiongkok dalam kerangka domestik dan asingkebijakan, yang dianggap terlalu hati-hati di luar negeri. "Nasionalisme baru" Tiongkok adalah hasil dari proses penguatan militer dan kekuatan ekonomi yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Contoh nyata nasionalisme dalam kebijakan luar negeri Beijing adalah konflik di Laut China Selatan, yang memancing reaksi agresif dari negara-negara tetangga mereka yaitu Filipina, Jepang, dan beberapa negara ASEAN lain. Peneliti percaya bahwa *soft power* yang dimaksud bukanlah nasionalisme baru yang dimaksud



Pada era globalisasi dan modernisasi ini, konsep *power* yang berkaitan dengan kekuatan militer dan uang merupakan hal yang tidak selalu berujung menguntungkan. Hal inilah yang dikatakan Nye (2002) bahwa terdapat fenomena *the changing face of power* yang mana sebuah negara bisa mendapatkan hasil yang diinginkan dalam politik internasional karena negara-negara lain setuju dan mengikuti terhadap situasi tersebut.

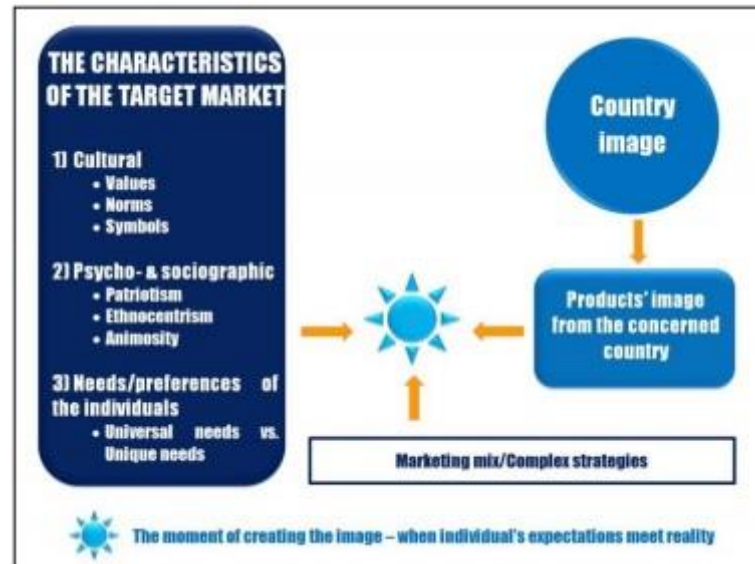
Breslin (2013) menulis bahwa “*soft power* dipahami sebagai gagasan bahwa orang lain akan menyelaraskan diri mereka dengan kita dan preferensi kebijakan kita karena mereka tertarik pada sistem, nilai, dan kebijakan sosial dan politik kita. Fakta bahwa pandangan negara lain terhadap Tiongkok disebutkan Mearsheimer (2006) bahwa negara tetangga seperti Jepang, India, Korea, Thailand, telah

menganggap Tiongkok sebagai ancaman bagi stabilitas tatanan internasional yang telah ada dengan berbagai kebijakan reaktif yang dikeluarkan. Hal ini merujuk pada kekuatan Tiongkok yang terletak pada ekonomi dan militer yang semakin hari semakin bertambah kuat.

1.3.3 National Image

Interaksi antar negara dengan negara mampu dijadikan sumber identitas nasional, Ted Hopf (2013) lebih dalam menjelaskan bahwa interaksi antara negara dengan warga negaranya juga dapat dijadikan sebagai sumber identitas nasional. Hal tersebut adalah pandangan konstruktivisme sosial yang mana struktur kognitif sosial yang ada dan secara otomatis diterima manusia melalui kebiasaan dan praktik untuk menghasilkan identitas mereka. Dari konstruktivisme sosial ini penulis mengambil teori *national image* yang sangat bergantung pada konstruksi ide yang ada di dalam masyarakat. Membangun dan menyajikan *national image* adalah bagian dari praktik *soft power* itu sendiri dengan tujuan meraih kekuatan di diplomasi publik dalam lingkungan internasional. Teori ini merupakan gabungan antara ilmu marketing, komunikasi, *public relations* dan sejarah, yang akhirnya mampu diformulasikan sebagai alat untuk mengukur *country image* dan digunakan untuk dasar pengambilan keputusan, hal ini terutama karena negara dengan reputasi yang baik akan mendapatkan keuntungan dalam kebijakan-kebijakan luar negerinya. Dalam mengukur *country image*, penulis berpedoman dengan tulisan Boulding (1959) yang melihat *national image* sebagai sebuah hal yang kompleks. Definisi mengenai *country image* atau *national image* dibedakan menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan internal dan eksternal, pendekatan internal bermaksud bahwa wajah dari sebuah negara bisa didefinisikan oleh bagaimana warga negaranya sendiri menginterpretasikan negaranya. Sedangkan pendekatan eksternal adalah bagaimana pihak luar atau orang di luar warga negaranya menginterpretasikan salah satu negara (Szeles, 1998). Oleh karena itu sebuah negara bisa saja memiliki *image* yang berbeda-beda dalam komunitas internasional dikarenakan setiap negara memiliki reaksi yang berbeda terhadap suatu *image*. Iversen dan Hem (2001) mampu memberikan gambaran tentang bagaimana ketika *image* dari sebuah negara terbentuk di pikiran orang luar, dalam

hal ini karakteristik budaya dan psikografis dari individu berperan dalam penentuannya.



Gambar 1.3 Proses Pembentukan *Country Image* (Iversen et al., 2001)

Bagan tersebut menjelaskan bahwa dalam pembentukan citra suatu negara bertindak dua hal kategori faktor yang berbeda yaitu: faktor rangsangan dan faktor pribadi. Stimuli-faktor terkait dengan rangsangan eksternal yang individu menerima sehubungan dengan negara yang bersangkutan dan elemen fisik terkait tetapi juga perjalanan sebelumnya yang dibuat oleh individu di negara yang bersangkutan; faktor pribadi terkait dengan sosial dan psikologiskarakteristik individu (Balogu dan McCleary, 1999). Li dan Chitty (2009) menemukan hal yang lebih dalam dari dua pendekatan internal dan eksternal, yaitu bahwa salah satu rangsangan yang ada adalah media dan hal ini merujuk pada *image* dari sebuah negara bisa berisikan dua kerangka. Kerangka pertama yaitu dimana publik yang ditampilkan di media berkaitan dengan gambar nasional media yang diproyeksikan, di mana persepsi dan laporan media massa tentang negara asing dinilai. Sedangkan kerangka kedua adalah bingkai pribadi yang dipegang di benak publik, mengacu pada citra nasional yang dirasakan, yang menunjukkan pendapat individu tentang negara lain.

Terlepas dari definisi makro dari *national image* oleh beberapa peneliti diatas, Amitai Etzioni (1962) mengatakan bahwa *national image* merupakan didalamnya termasuk struktur budaya politis, ekonomi, budaya, dan potensi militer. Hal tersebut memiliki banyak persamaan dengan *soft power* yang melingkupi banyak elemen dalam formulasinya. Namun dalam aplikasinya keduanya berbeda, *country's image* tidak hanya narasi saat ini, melainkan sejarah memainkan peran penting hingga sampai pada titik dimana mereka mampu mempengaruhi persepsi perseorangan.

1.3.4 Konstruktivisme Struktural

Konstruktivis adalah ilmu mengenai bagaimana cara pemaknaan dan pemahaman terhadap interaksi sosial yang ada, lalu dilanjutkan pada tahap bagaimana implikasinya terhadap manusia. Implikasi tersebut memunculkan adanya konstruksi struktural yang ada pada suatu masyarakat atau kelompok, contohnya adalah munculnya identitas, norma, dan budaya (Johnson, 1995). Menurut Barnett (2008) konstruktivis pada umumnya lebih membahas mengenai pemahaman dalam menangkap interpretasi para aktor yang ada didalam struktur mengai aktivitas dan tindakannya untuk mengetahui fenomena yang terjadi. Hal ini memunculkan pilihan rasional memandang struktur sebagai faktor yang mengekan dan meregulasi aktor sedangkan konstruktivisme memandangnya sebagai sesuatu yang menyusun identitas dan kepentingan aktor. Sedangkan Alexander Wendt (1999) mempunyai pandangan yang sedikit berbeda bahwa struktur terdiri dari tiga elemen yaitu, pengetahuan bersama, sumber daya material, dan praktik-praktik. Dalam hal ini proses-proses interaksi dalam struktur memproduksi dan mereproduksi struktur sosial itu sendiri entah secara kooperatif ataupun kofliktual. Oleh karena, hal tersebut yang mampu membentuk identitas dan kepentingan para aktor. Maka dari itu argumen dasar dari Wendt adalah identitas nasional bersumber dari interaksi antar negara dalam struktur internasional yang ada.

Finnemore (2001) juga sepakat dengan Wendt bahwa kepentingan adalah bentuk dari konstruksi interaksi sosial yang ada, sehingga dalam struktur hubungan internasional, interaksi antar negara merupakan dipacu dari kepentingan tersebut. Konstruktivisme struktural berbeda dengan konstruktivisme sosial yang dibawa

Hopf (2013) yang lebih detil dalam melihat fenomena atau isu yang ada sehingga memerlukan analisis yang lebih. Hopf melihat bahwa terdapat interaksi antara negara dengan masyarakatnya yang bisa dijadikan pertimbangan dari sumber identitas nasional itu sendiri. Hopf terkenal dengan *mass common sense* yang dilihat sebagai refleksi dari struktur kognitif sosial. Namun dalam studi kasus Tiongkok, mengingat bahwa Tiongkok merupakan negara yang otoriter, konstruktivisme struktural akan lebih akurat dalam menjelaskan fenomena yang ada. Hal ini juga mengingat bahwa Tiongkok memiliki posisi yang cukup penting dalam struktur internasional yang anarki.

1.4 Argumen Penelitian

Pertama, mega-proyek Belt Road Initiatives merupakan sebuah kebijakan yang lahir dari dorongan identitas Tiongkok dan merupakan manifestasi dari konstruksi struktural sistem internasional yang ada. Kedua, Tiongkok menggunakan kebijakan BRI sebagai upaya *national image branding* dalam fenomena *peaceful rise of China*. Dengan begitu kebijakan BRI secara tidak langsung didukung dan mendukung *national image* Tiongkok dalam agenda Tiongkok terutama agenda besar *peaceful rise* mereka.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Operasionalisasi Konsep

1.5.1.1 Soft Power Tiongkok

Inti dari *soft power* adalah budaya, sedangkan budaya adalah salah satu dari dua diskursus yang berkembang dalam topik *soft power* Tiongkok. Opini sebelum merupakan opini *mainstream* yang dipimpin oleh sosiologis dan filosof. Sedangkan opini minoritas tidak mengesampingkan pentingnya budaya namun lebih berfokus terhadap bagaimana sumberdaya *soft power* dipergunakan dimana didukung oleh para ahli Ilmu Hubungan Internasional. Dalam hal ini, opini *mainstream*, memiliki dampak yang besar dalam proses pengambilan kebijakan. Hal tersebut telah digunakan oleh pemimpin-pemimpin Tiongkok untuk menyebarkan pengaruh *soft power* Tiongkok ke negara lain. Direktur Shanghai

Institute of International Studies (SIIS), Yu Xintian, adalah salah satu tokoh yang mendukung *culture school of thought*. Dia meyakini bahwa sejarah dan budaya tradisional Tiongkok merupakan sumber *soft power* yang berharga untuk menarik tidak hanya tetangga di kawasan Asia, yang sama-sama menganut warisan Confucian, melainkan juga secara internasional. Sehingga dalam tulisan ini *soft power* yang dimaksud oleh penulis adalah konsep yang menitikberatkan pada kemampuan negara untuk mempengaruhi negara lain tanpa penggunaan kekerasan dan paksaan. *Soft power* juga merupakan negara asing akan menyelaraskan diri mereka dengan suatu negara dan preferensi kebijakan dari negara tersebut karena mereka tertarik pada sistem, nilai, dan kebijakan sosial dan politik yang dimiliki oleh suatu negara.

1.5.1.2 National Image Tiongkok

Konsep *national image* adalah konsep yang merepresentasikan pembawaan sebuah negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Boulding (1959) menyebutkan bahwa konsep ini merupakan konsep yang kompleks dimana didalamnya terdapat elemen-elemen *soft power*. Yang membedakan keduanya adalah bagaimana *soft power* berkaitan langsung dengan proses formulasi kebijakan luar negeri, sedangkan *national image* merupakan alat tambahan untuk mendukung *soft power* suatu negara. Jonathan Mercer (1996) mendefinisikan *national image* sebagai properti negara yang tidak diakui secara universal melainkan sebuah rangkaian persepsi dari orang lain. Hal ini sehubungan dengan yang diperlukan dalam analisis kebijakan luar negeri level identitas menurut Ole Weaver (2002) yang *layer* atau lapisan pertamanya adalah menentukan “we” and “them”. Yang menjadi tekanan adalah bagaimana media massa memainkan peran yang lebih dalam pembentukan *image* dari sebuah negara seperti pada penelitian Brewer (2003). Menurut Brewer orang-orang sangat bergantung pada media untuk mendapatkan informasi mengenai isu-isu internasional. Hal ini didukung juga dalam perspektif sosial psikologi oleh Lippmann (1922) bahwa cara orang mempelajari sesuatu adalah dengan mendefinisikan terlebih dahulu lalu melihat, dalam hal ini stereotip dan pengalaman seseorang mempengaruhi pemahaman orang terhadap sebuah gambar. Oleh karena itu penelitian ini melihat bahwa

national image adalah bagaimana Tiongkok tampil di media sebagai presentasi berdasarkan pada gagasan bahwa media tidak hanya mewakili pandangan publik, sampai batas tertentu, tetapi juga membentuk citra mereka tentang negara lain, dalam kasus ini citra nasional yang positif adalah soft power dan menguntungkan dalam perumusan kebijakan luar negeri.

1.5.2 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan eksplanatif untuk memaparkan, menerangkan, serta menjelaskan hipotesis yang telah dibuat dari variabel-variabel di dalam penelitian (Bhattacharjee, 2012). Hubungan anatar variabel dalam penelitian eksplanatif memungkinkan sifat kausalitas yang bisa mendorong ataupun menghambat suatu pergerakan. Dalam penelitian ini variabel independen akan mendorong terjadinya sebuah perubahan dengan variabel dependen.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer didapatkan oleh arsip strategi nasional, militer dan beberapa data pernyataan resmi elit politik terkait pengembangan budaya Tiongkok yang dilansir dari situs resmi pemerintah dan kementerian Tiongkok dan beberapa negara lain yang terkait dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, Jurnal ilmiah, artikel yang terdapat dalam buku maupun Jurnal online, surat kabar, dokumen pemerintah resmi yang dipublikasikan dalam situs situs di internet, pidato dan wawancara resmi oleh aktor pemerintahan Tiongkok yang di unggah dalam situs di Internet. Selain itu sumber juga berasal dari penelitian penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa similaritas dengan penelitian ini.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diajukan, tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Penulis menjelaskan dan menghubungkan dua atau variable yang menjadi faktor penyebab atau pengaruh dari ketetapan variable dependen,

hal ini bertujuan untuk menyampaikan, menjelaskan, serta menguji hipotesis yang telah dibuat dari variabel-variabel yang ada pada penelitian. Dalam penelitian ini, masalah yang diangkat adalah mengapa Tiongkok pada saat memiliki kestabilan ekonomi dan politik mau mengeluarkan kebijakan Belt Road Initiatives Tiongkok pada tahun 2013. Dengan tujuan tersebut, maka langkah-langkah yang diambil adalah menemukan kecenderungan utama yang melatarbelakangi pengambilan kebijakan Tiongkok. Kecenderungan tersebut dapat didapat melalui analisis terhadap tingkat kerjasama ekonomi dan politik Tiongkok sebelum tahun 2013 dan dikaitkan dengan pendekatan identitas dan budaya untuk menjelaskan alasan lain pengambilan kebijakan BRI Tiongkok.

1.5.5 Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pendekatan identitas dan budaya sebagai alasan munculnya kebijakan BRI Tiongkok pada tahun 2013, dilihat dari kriteria-kriteria studi budaya dan pola kebijakan Tiongkok dari tahun ke tahun. Jangkauan penelitian yang ditetapkan bagi pengkajian fenomena ini adalah dari tahun 2004 hingga tahun 2018, rentang waktu tersebut ditentukan atas dasar kebutuhan penulis untuk menjabarkan pola kebijakan Tiongkok beberapa waktu setelah munculnya konsep *peaceful rise* dari Zheng Bijian atas respon dari *China's Threat* yang disampaikan oleh AS. Sedangkan 2018 merupakan peringatan 5 tahun kebijakan BRI telah berjalan dan mampu dianalisis dampak eksistensinya dalam level internasional.

1.5.6 Tujuan Penelitian

Penulis bertujuan untuk membuktikan dan menjelaskan bahwa kebijakan Belt and Road Initiatives merupakan kebijakan yang muncul dari dorongan identitas Tiongkok dan juga membentuk identitas Tiongkok yang baru dalam level internasional. Dengan diketahuinya identitas Tiongkok, diharapkan bahwa perumus kebijakan luar negeri mampu menyesuaikan kebijakan mereka terhadap pola kebijakan yang muncul dari identitas tersebut.

1.5.7 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab II Belt and Road Initiatives Sebagai Master Plan Tiongkok Secara global

Bab III Image Shaping Tiongkok melalui BRI

Bab IV BRI dan *Peaceful Rise of China*

Bab V Kesimpulan